



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan
Kashmir: Perspektif Identitas Sosial**

Skripsi

Oleh

Aufar Muhammad Rizki

2016330191

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan
Kashmir: Perspektif Identitas Sosial**

Skripsi

Oleh

Aufar Muhammad Rizki

2016330191

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : AUFAR MUHAMMAD RIZKI
Nomor Pokok : 2016330191
Judul : Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan Kashmir:
Perspektif Identitas Sosial

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 29 Juli 2020.
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

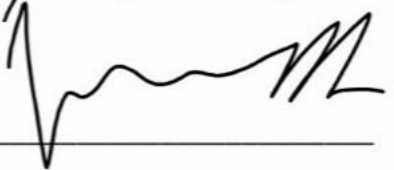
Ketua sidang merangkap anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA


: 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aufar Muhammad Rizki

NPM : 2016330191

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan Kashmir: Perspektif
Identitas Sosial.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah dengan penulisan sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juli 2020



Aufar Muhammad Rizki

Abstrak

Nama : AUFAR MUHAMMAD RIZKI

NPM : 2016330191

Judul : Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan Kashmir: Perspektif Identitas Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa yang menjadi dasar klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir. Kemudian akan menjelaskan mengapa aspek yang menjadi dasar klaim ini dapat menjadi dasar yang kuat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Pakistan berusaha mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir yang notabene berada di bawah kekuasaan Pemerintah India. Pakistan sebenarnya telah memiliki wilayah kekuasaan di Kashmir sebagaimana juga India. Wilayah kekuasaan dua negara di Kashmir ini dibatasi oleh *line of control* yang telah disepakati. Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran dari konsep *religious social identity* sebagai konsep turunan dari *social identity theory*. Konsep ini menjelaskan bagaimana peran agama dalam membentuk suatu identitas sosial dalam kelompok. Agama memiliki kapabilitas tinggi dalam memberikan identitas bagi kelompok. Agama juga dapat membentuk narasi satu kelompok yang terbangun sejak awal kelompok tersebut, sehingga narasi ini dapat mengelompokkan siapa saja yang menjadi bagian dari mereka dan siapa yang bukan.

Temuan pada penelitian ini adalah bahwa klaim Pakistan atas wilayah Jammu dan Kashmir ini berdasarkan faktor identitas sosial yakni agama Islam, karena mayoritas penduduk Pakistan memiliki kesamaan dengan mayoritas penduduk Jammu dan Kashmir yakni pemeluk agama Islam. Lebih jauh lagi, berdasarkan aspek historis, Pakistan dan Jammu dan Kashmir ini memiliki pengalaman sejarah yang mirip, sebab wilayah keduanya di masa lalu merupakan bagian dari kerajaan Islam di Asia Selatan yaitu Dinasti Mughal dan Kesultanan Delhi. Islam juga berperan dalam membangun identitas nasional Pakistan sejak perjuangan kemerdekaan Pakistan dari pemerintah kolonial Inggris. Narasi nasional negara Pakistan juga banyak dipengaruhi oleh faktor agama Islam sebagai agama mayoritas di Pakistan, salah satunya narasi Pakistan sebagai *moslem homeland* atau tanahnya umat Muslim. Narasi ini memberikan justifikasi pada klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir, sebab Pakistan mengklaim negaranya merupakan tempat yang tepat untuk masyarakat Jammu dan Kashmir 'pulang' ke tanahnya umat Muslim, tempat yang lebih aman dan nyaman bagi mereka.

Kata kunci: Pakistan, Jammu dan Kashmir, Islam, klaim dan identitas sosial.

Abstract

Name : AUFAR MUHAMMAD RIZKI
Student Number : 2016330191
Title : Pakistan's Basic Claim In Jammu and Kashmir Territory:
Social Identity Perspectives

The purpose of this research is for search what the basic claim of Pakistan for Jammu and Kashmir territory. Then, this writing will elaborate how that aspect could be a give strong basic claim. This research started from when Pakistan claim Jammu and Kashmir territory which is it was under Indian Government control. Actually, Pakistan has their control in Kashmir state, nad also India too. The Pakistan's and India's control arae in Kashmir has bordered by line of control who agreed by both of them before. In this research, writer use a conceptual framework from religious social identity, micro parts of *social identity theory*. This concept explain how the role of religion in constructing the social identity in a social group. Religion has high capability for supply the identity-needs. Religion also can supporting a strong narrative for a social group, since the first of it developmental stage, with the result that the narrative could be categorize who are the member of them and who are not.

Findings of this research are that the basics claim of Pakistan in Jammu and Kashmir area is by an social identity aspect that is religion, because the religion majority in Jammu and Kashmir and in Pakistan are same. Islam is the majority religion in both of them territory. Furthermore, through the historcial empiricism of Pakistan and Jammu and Kashmir, has similarity. That is in the past, both of them territory are under power of the islamic imperium in Southern part of Asia, that is Delhi Sultanate and Mighal Dinasty. Islam also has a role for constructing the national identity of Pakistan since national movement of Pakistan when they still under British colonialism. National narrative of Pakistan also supplied by islamic factor as islam as a majority religion in Pakistan. The thing is one of narrative is Pakistan claim that they are moslem homeland. This narrative justify that Pakistan's claim on Jammu and Kashmir, because it mentioned that Pakistan is the right land for the people of Jammu and Kashmir for 'come back home' to the moslem homeland, the safe and secure land.

Keyword: Pakistan, Jammu and Kashmir, islam, claim, and social identity.

Kata Pengantar

Bukan suatu perjalanan mudah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi sarjana Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan ini. Rintangan dan ujian yang penulis jalani sejak awal masa perkuliahan pada Agustus tahun 2016 hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini pada pertengahan tahun 2020 ketika kita sedang mengalami krisis pandemi *covid-19*. Adalah hal baru bagi kita semua, mahasiswa, tenaga pengajar hingga pegawai universitas menghadapi proses perkuliahan di masa pandemi ini, segala adaptasi proses belajar mengajar harus dihadapi dengan proses singkat. Namun hal ini tidak menghalangi penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini yang tentunya dengan bantuan dosen pembimbing, Mas Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. yang saya hormati, serta seluruh staf pegawai FISIP Unpar. Di luar itu semua, tentu penulis mengucapkan syukur yang teramat sangat kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat rahmat dan kehendakNya skripsi yang saya kerjakan selama sepuluh bulan terakhir dapat dibawa ke ujian sidang sarjana dan selesai.

Penulisan skripsi ini didorong oleh rasa keingintahuan penulis yang tinggi terhadap dinamika regionalisme di kawasan Asia Selatan. Kawasan yang sering disebut dengan anak benua Asia ini memiliki dinamika yang kompleks karena masyarakatnya yang multikultur serta angka demografinya yang tinggi, setidaknya dua dari delapan negara di Asia Selatan memiliki jumlah penduduk diatas angka 200 juta jiwa. Selain faktor demografi, faktor kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki oleh India dan Pakistan juga membuat dinamika keamanan regional Asia Selatan semakin tidak menentu. Ditambah lagi konflik perbatasan serta klaim

wilayah satu sama lain menjadi permasalahan yang umum di Asia Selatan. Berangkat dari kompleksitas dinamika Asia Selatan ini, maka penulis mengambil salah satu permasalahan yang cukup populer di kawasan ini yaitu sengketa wilayah Jammu dan Kashmir sebagai topik penelitian guna memberikan gambaran utuh dan mendetail bagi penstudi Hubungan Internasional di masa yang akan datang. Setidaknya barangkali akan dapat bermanfaat bagi adik tingkat penulis yang membutuhkan referensi studi Kawasan Asia Selatan yang hingga penulis menyelesaikan studi belum terdapat mata kuliah “HI di Asia Selatan” pada program studi Hubungan Internasional Unpar.

Sekian kata pengantar dari skripsi ini, penulis memohon maaf sebesar besarnya atas segala kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja pada data, penulisan naskah hingga tata pengutipan sumber referensi pada penulisan ini, mengingat penulis hanyalah manusia biasa yang masih harus belajar dan menimba ilmu lebih banyak lagi. Oleh karena itu, penulis terbuka atas kritik, saran dan masukannya dari pembaca tulisan ini yang sekiranya dapat membuat pengetahuan dan kemampuan penulis menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang.

Bandung, 21 Agustus 2020.

Aufar Muhammad Rizki

Ucapan Terima Kasih

Seindah apapun ucapan terima kasih pada lembar ini tidak dapat membayar seluruh kebaikan dari orang - orang yang terlibat dalam proses kuliah dan penulisan skripsi ini. Namun dalam ruang yang terbatas ini izinkan penulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam terhadap pihak yang berperan penting dalam berlangsungnya studi Sarjana Hubungan Internasional penulis ini.

Awal kata, terima kasih yang teramat besar kepada kedua orang tua penulis, Akhmad Qoyum dan Tina Martina A.T Msi. yang telah mendukung penulis sepenuh hati, baik secara moral maupun finansial untuk melanjutkan studi di HI Unpar pada pertengahan 2016 lalu hingga akhirnya selesai pada Agustus 2020 ini. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan tinggi serta pengembangan diri anaknya, sehingga menjadikan penulis seperti saat ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih untuk anggota keluarga lain yang mendukung dan memberi motivasi terhadap penulis untuk tetap semangat mengikuti perkuliahan hingga lulus menjadi sarjana.

Penulis ucapkan kembali terima kasih kepada Mas Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi ini. Jika bukan karena beliau, tulisan ini tidak akan selesai menjadi sebuah skripsi yang dijadikan syarat kelulusan pendidikan sarjana. Terima kasih atas kesabaran dan ketekunannya yang telah membimbing penulis selama sepuluh bulan terakhir, selain itu diskusi – diskusi ringannya setiap pertemuan ketika bimbingan baik secara tatap muka maupun melalui daring memberikan saya pengetahuan yang luar biasa terhadap pembentukan pola pikir, analisis hingga pencarian jalan keluar yang solutif.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih pada dosen lain yang berperan penting dalam perjalanan kuliah penulis seperti Mba Sylvia Yazid, Mba Nophie, Mas Rulyusa, Mas Sakti, Mas Marsell, Mas Nyoman, Mba Ratih, Mba Prisca dan Mas Apresian yang saat ini sedang menempuh studi Ph.D di Leeds University. Selain itu penulis juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh dosen dan pegawai di lingkungan Departemen Hubungan Internasional maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Terima kasih juga kepada teman – teman penulis yang sangat mewarnai kehidupan perkuliahan di Bandung sejak tahun 2016 hingga 2020 ini. Terima kasih kepada: Mario Sumiharto, Bagus Givari, Fadli Rashid, Muhammad Kharisma, Muhammad Pringgodigdo, Pieter Wibisono, Ruben Ricardo, Enrico Nataniel, Joe William, Carlos Owen, Gibraldi Radifan, Ananda Samuel, Putu Bagoes, Ezra Permana, Nicander Wijaya, Ivan Abygail, Ivan Andreas, Satrio Negoro, Daniel Shabiru, Cindy Irawan, Rannesa Nainggolan, Jevon Nattasya, Raihan Zahirah, Bella Dominica, Graciella Yoshanty, Angie Ginting, Grandi Raharjo, Nicky Putri, Nydia Anjani, Kathleen Mintarja, Nabilla Wade, Stella Claresta, Jelny Tan, Bella Dewanti, Aretta Ananda, Cheryl Pangestu, Dyankaputri Dila, Nadine Putri, Halimah Anjani, Alifah Budi, Alanna Deborah, Ariel Cleochika, Celine Budiman, Magdalena Venasia, Rayvindira Athena, dan teman – teman lain yang tak dapat disebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih penulis khususkan kepada teman – teman dari Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional (KSMPMI), yaitu: Angeline Syah Darma, Sophia Yohanes, Claudia Karin, Togu Alexander, Daniel Tantra, Bobby Hizkia, Ivan Samuel, Ari Budi, Margareth Silaban, Esther Alfania, Amy Debora, Maria

Mediatrix, Miftahul, Muhammad Tasyar, Daffa Haikal, Ignatius Yonatan, Savitri Nurlia Devi, Gisela Bernadi, Defe, Florence, Via Goviana, Devira Sharvensya, Petra Paramita, Aisha Anjani, Raylingga, Natasha Halim, Reyna Seto, Kendri, Fandris Manik, Michelle Angela, Jamie Shania, Alifa Qumari, Mutiara Christie, Meitania, Tiffany Angelica, Shafirda dan teman yang lainnya. Ucapan terima kasih khusus juga penulis haturkan untuk rekan – rekan Medicomrade, yaitu: Anne Natasha, Ary, Rizky Yudha, Olga, Ardiani Hanifa, Brigitta Prinsila, Revan Fauzan, Claireina Diana, Ayu Nathalia, Abiesa, Aji, Fernando, Faiza Fitia, Aloysius Susanto, Rianti Nasserie, Teresa Retno Arsanti, Grace Jessy Ciputri, Jessica Citro, Jessica Celine, Salsabilla, Milly Mihaly, Lingkan Rumambi, Gabriella Kimberly Huistar serta rekan rekan divisi *medic* lainnya yang luar biasa.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ucapan Terima Kasih	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Pembatasan Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kajian Literatur	7
1.4.2. Kerangka Pemikiran	10
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.1. Metode Penelitian.....	13
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data	14
1.6. Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	19
Kondisi Geopolitik Jammu dan Kashmir	19
2.1. Status Quo Jammu dan Kashmir	19
2.1.1 <i>Line of Control</i> dan <i>Simla Agreement</i>	21

2.1.2. Jammu dan Kashmir di Bawah Wilayah Administrasi India.....	27
2.1.3 <i>Special status</i> Jammu dan Kashmir.....	32
BAB 3.....	36
Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan Kashmir	36
3.1. Profil dan Sejarah Berdirinya Negara Pakistan	37
3.1.1 Sejarah Islam di Sub benua Asia Selatan	41
3.1.1.1 Kesultanan Delhi	43
3.1.1.2. Dinasti Mughal.....	46
3.1.2. Islam Sebagai Identitas Negara Pakistan.....	51
3.2. Pakistan Sebagai <i>Moslem Homeland</i>	60
BAB 4	68
Kesimpulan.....	68
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Jammu dan Kashmir merupakan bagian dari wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India. Secara geografis *union territories*¹ Jammu dan Kashmir ini terletak di wilayah paling utara dari India, berbatasan dengan Negara Bagian Himachal Pradesh di bagian selatannya, pada bagian barat hingga utara berbatasan dengan *autonomous territory* Azad Jammu dan Kashmir dan Gilgit-Baltistan, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan *union territories*² lain yaitu Ladakh.³ Sejak tahun 2019, Pemerintah India mengeluarkan kebijakan *Reorganisation Bill* yang isinya adalah menarik status istimewa yang dimiliki oleh Negara Bagian Jammu dan Kashmir, sekaligus mengubah status administrasi yang sebelumnya *state* atau negara bagian menjadi *union territories* untuk Jammu dan Kashmir dan Ladakh.⁴

¹ Sejak tahun 2019, status Jammu dan Kashmir sebagai negara bagian (*state*) dari India berubah status menjadi *union territories*. Perubahan ini berdampak pada sistem otonomi Jammu dan Kashmir yang semula memiliki pemerintahan sendiri, menjadi berada di bawah Gubernur Letnan Girish Chandra Murmu.

² Sama halnya dengan Jammu dan Kashmir, Ladakh yang semula menjadi bagian dari negara bagian dari Jammu dan Kashmir, pada tahun 2019 berubah status menjadi *union territories* dan berdiri sendiri terpisah dengan *union territories* Jammu dan Kashmir. Pemerintahan Ladakh ini dipimpin oleh Radha Krishna Mathur.

³ Government of Jammu and Kashmir, Directorate of Economics and Statistics, J&K. "Economic Survey 2014 – 2015, Volume I". Diakses pada 3 Juli 2020.

⁴ Hermant Singh. Jagranjosh. "What Is The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019?". 14 Maret 2020. Diakses pada 2 Juli 2020. <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/jammu-and-kashmir-reorganisation-bill-2019-1566908022-1>

Kashmir secara keseluruhan telah menjadi daerah konflik sejak Inggris meninggalkan tanah jajahannya di Asia Selatan pada 1947, sejak itu wilayah Kashmir yang dipimpin oleh Maharaja Hari Singh meminta bantuan tentara India untuk membantu pertahanan wilayah Kashmir yang saat itu diserang oleh tentara Pakistan, sejak peristiwa ini konflik antara India dan Pakistan mulai terekskalasi.⁵

Setelah kedua negara ini mengalami konflik karena masalah perbatasan, pada tahun 1972 disepakatilah *Simla Agreement* antara India dan Pakistan yang di dalamnya menyetujui persoalan perbatasan kedua negara serta kedaulatan negara masing – masing.⁶ Melalui *Simla Agreement* disepakati bahwa antara India dan Pakistan memiliki *line of control* masing – masing untuk wilayah Kashmir.⁷ Pada *Simla Agreement* yang disetujui pada tanggal 2 Juli 1972, tercantum beberapa poin yang menerangkan hubungan antara India dan Pakistan dalam hal perbatasan wilayah, salah satunya menjelaskan disepakatinya *line of control*.

Pada perjanjian ini, *line of control* disebutkan sebagai garis kekuasaan yang berdasarkan pada gencatan senjata pada 17 Desember 1971, dan harus dihormati serta dipatuhi oleh kedua belah pihak, tidak boleh ada pihak yang mengubahnya tanpa ada persetujuan pihak lain.⁸ Kedua pihak harus berkomitmen untuk menahan diri serta menghindari penggunaan kekuatan bersenjata di dalam *line of control* ini.⁹ *line of*

⁵ Manavi Kapur. Quartz India. “A Timeline of Key Events That Shaped The Unique Identity of Kashmir Within India”. 6 Agustus 2019. Diakses pada 1 Juli 2020. <https://qz.com/india/1682124/a-timeline-of-jammu-kashmirs-modern-history-and-article-370/>

⁶ Ahona Sengupta. “What is Simla Agreement and How It Is Relevant Amid Trump’s Kashmir Mediation Gaffe”. News 18. 2019. Diakses pada 21 November 2019. <https://www.news18.com/news/india/what-is-simla-agreement-and-how-it-is-relevant-amid-trumps-kashmir-mediation-gaffe-2242309.html>

⁷ Ibid.

⁸ Ministry of External Affairs, Government of India. “Simla Agreement July 2, 1972”. 24 Juli 2014. Diakses pada 27 November 2019. <https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?19005/Simla+Agreement+July+2+1972>

⁹ Ibid.

control secara mudah dapat didefinisikan sebagai garis batas kekuasaan. Maksudnya adalah garis yang membatasi wilayah mana yang dikuasai atau berada di bawah kontrol dari pemerintah India dan pemerintah Pakistan. Wilayah Kashmir yang berada di dalam *line of control*nya Pakistan sering disebut sebagai PoK (Pakistan Occupied Kashmir), sedangkan wilayah Kashmir lain yang berada di dalam *line of control*nya India sering disebut dengan IoK (Indian Occupied Kashmir), tetapi sebagian sumber ada yang menyebutnya *Indian administered Kashmir*. Mengutip dari beberapa sumber yang penulis dapatkan, pengertian *line of control* adalah garis batas atas kontrol kekuasaan sepanjang 450 mil antara India dan Pakistan di wilayah Jammu dan Kashmir, termasuk garis kontrol militer yang diakui secara *de facto* oleh kedua negara.¹⁰

Letak Geografis Kashmir ini berada di bagian utara dari India, serta berada di timur laut dari Pakistan. Daerah kekuasaan kedua negara atas wilayah Kashmir dibatasi oleh *line of control*. Wilayah kekuasaan India di Kashmir atau disebut juga dengan *Indian administered Kashmir* berada di bagian selatan Kashmir. Sedangkan wilayah kekuasaan Pakistan di Kashmir ini disebut dengan *Pakistan occupied Kashmir* yang berada di bagian barat dan bagian utara dari wilayah Kashmir. *Pakistan occupied Kashmir* yang berada di sebelah barat Kashmir disebut juga Azad Jammu dan Kashmir ini terdiri dari wilayah Bagh, Bhimbar, Hattian, Haveli, Kotli, Mirpur, Muzaffarabad, Nilam, Punch dan Sudhnotti dengan kota Muzaffarabad sebagai ibu kotanya.¹¹ Sedangkan untuk

¹⁰ Lihat pada Definitions.net “Definitions for Line of Control”. 29 November 2019. Diakses pada 30 November 2019 <https://www.definitions.net/definition/Line+of+Control>. Lihat juga pada Aayushi Namdev. MyIndia. “The International Border Lines of India”. 25 April 2019. Diakses pada 30 November 2019. <https://www.mapsofindia.com/my-india/education/the-international-border-lines-of-india>. Atau lihat juga pada Shikha Goyal. Jagranjosh. “Which States of India Share Boundaries With Pakistan?”. 10 Juli 2019. Diakses pada 30 November 2019. <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/which-states-of-india-share-boundaries-with-pakistan-1562676543-1>

¹¹ Lihat pada CityPopulations. “Azad Jammu and Kashmir”. 13 April 2019. Diakses pada 30 November 2019. <https://www.citypopulation.de/AzadKashmir.html>. Lihat juga Azad Government

wilayah Pakistan yang lain berada di bagian utara Kashmir yaitu *autonomous territory* Gilgit-Baltistan yang terdiri dari kota Astore, Diamer, Ghanche, Ghizer, Gilgit, Hunza, Nagar, dan Skardu dengan Gilgit sebagai ibu kotanya.¹² Wilayah India yang berada di dalam *line of control* ini bernama Jammu dan Kashmir memiliki dua ibu kota yakni Jammu dan Srinagar. Srinagar menjadi ibukota di musim panas sedangkan Jammu ibu kota ketika musim dingin. Wilayah Jammu dan Kashmir ini terdiri dari wilayah Jammu, Srinagar, Anantnag, Udhampur, Baramula, Sopore, Kathua, Bandipura dan Leh.¹³

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa baik Pakistan maupun India telah memiliki wilayah kekuasaan masing - masing di wilayah Kashmir yang dibatasi oleh *line of control*. Namun Pakistan berusaha untuk mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir, atau wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India.¹⁴ Pada penelitian ini penulis akan membahas apa yang menjadi dasar klaim Pakistan atas wilayah Jammu dan Kashmir, serta bagaimana aspek tersebut dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap dasar klaim Pakistan.

Proses pengidentifikasian masalah di dalam tulisan ini berangkat dari tindakan Pakistan yang mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir, kendati mereka telah memiliki

of The State of Jammu and Kashmir. "Planning and Development Department". 2019. Diakses pada 30 November 2019. <https://pndajk.gov.pk/index.php>

¹² CityPopulations. "Gilgit-Baltistan" 3 Januari 2016. Diakses pada 30 November <https://www.citypopulation.de/GilgitBaltistan.html>

¹³ Lihat pada CityPopulations. "Jammu&Kashmir". 29 September 2016. Diakses pada 30 November 2019. <https://www.citypopulation.de/India-JammuKashmir.html>. Lihat juga pada Jammu & Kashmir official State Portal "Districts". 1 November 2019. Diakses pada 30 November 2019. <https://www.jk.gov.in/jammukashmir/?q=index>

¹⁴ Mudassir Ali dan Ali Maqbool. Foreign Policy. "In The Line of Fire Along Kashmir's Line of Control". 7 November 2019. Diakses pada 30 November 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/11/07/in-the-line-of-fire-along-kashmirs-line-of-control/>

wilayah kekuasaannya sendiri yang dibatasi oleh *line of control* itu. Pakistan yang merupakan negara berdaulat, telah memiliki kontrol penuh atas wilayah Azad Jammu dan Kashmir dan Gilgit-Baltistan, dua wilayah ini merupakan bagian dari satu wilayah Kashmir yang terletak pada bagian barat dan utaranya. Namun titik permasalahannya adalah Pakistan melakukan aksi klaim juga terhadap wilayah Kashmir lainnya yaitu Jammu dan Kashmir yang notabene sudah berada di bawah kekuasaan Pemerintah India. Berbagai justifikasi dikerahkan oleh Pemerintah Pakistan dalam aksi klaimnya ini melalui media, maupun ucapan pemimpin Pakistan, Imran Khan salah satunya adalah soal persamaan identitas. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir dengan dasar persamaan identitas tersebut.

Pakistan mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir karena adanya faktor persamaan identitas antara penduduk Jammu dan Kashmir dan warga negara Pakistan.¹⁵ Persamaan identitas yang dimaksud adalah baik penduduk Jammu dan Kashmir maupun warga negara Pakistan secara mayoritas menganut agama islam sebagai keyakinan mereka.¹⁶ Jumlah penganut agama islam di Kashmir ini mencapai angka 68% dari keseluruhan penduduk Kashmir, sedangkan penganut agama hindu sebesar 28,4%, serta agama Sikh sebesar 1,5%.¹⁷ Sebagai negara muslim yang juga berasal dari sub-kontingen India, Pakistan merasa memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan wilayah Kashmir, pun begitu dengan masyarakatnya.¹⁸ Lebih jauh lagi, Kashmir dengan mayoritas

¹⁵ William Barton. Foreign Affairs. "Pakistan's Claim to Kashmir". 1 January 1950. Diakses pada 1 Desember 2019. <https://www.foreignaffairs.com/articles/kashmir/1950-01-01/pakistans-claim-kashmir>

¹⁶ Atul Singh. Fair Observer. "Kashmir Explained: Why India and Pakistan Fight over it". 27 Agustus 2019. Diakses pada 1 Desember 2019. https://www.faiobserver.com/region/central_south_asia/explained-kashmir-dispute-india-pakistan-jammu-kashmir-23804/

¹⁷ India Population 2019. "Population of Jammu and Kashmir 2019". Diakses pada 1 Desember 2019. <https://indiapopulation2019.com/population-of-jammu-kashmir-2019.html>

¹⁸ Ibid.

penduduknya yang memeluk agama islam ini dilihat oleh Pakistan sebagai faktor demografis alami yang dapat memperkuat *nation-building* negaranya.¹⁹ Sehingga Pakistan memiliki ambisi untuk membawa Jammu dan Kashmir menjadi bagian dari teritori negaranya.²⁰

Klaim Pakistan atas wilayah Jammu dan Kashmir telah terlihat sejak pertama kali terekskalasinya konflik Kashmir yang terjadi *great partition* atau pemisahan wilayah antara India dan Pakistan. Meski telah melalui beberapa kali dialog bilateral hingga membangun kesepakatan perdamaian antara kedua negara, kerap terjadi bentrokan bersenjata antar pasukan bersenjata dari kedua negara.²¹ Pakistan terus mengerahkan pasukan militernya di perbatasan utara dari wilayah kekuasaan India yaitu di Jammu dan Kashmir.²² Pengerahan pasukan militer di perbatasan ini tentu memantik permasalahan lain sebab menimbulkan rasa tidak aman bagi pertama, penduduk Jammu dan Kashmir yang merasa selalu diawasi pasukan bersenjata. Kedua, tentu untuk pemerintah India. Sebab India merasa Pakistan mulai menebar ancaman dengan mengerahkan pasukan bersenjatanya di batas wilayah mereka yang seharusnya ini menjadi wilayah kedaulatan India. Pengerahan pasukan bersenjata ini menjustifikasi bahwa Pakistan memang memiliki tujuan nyata terhadap Jammu dan Kashmir

¹⁹ Atul Singh, Manu Sharma. Fair Observer. "What Lies Behind India's Bold Bet on Kashmir?". 10 Agustus 2019. Diakses pada 1 Desember 2019. https://www.fairobservers.com/region/central_south_asia/kashmir-conflict-war-india-narendra-modi-pakistan-world-news-43899/?gclid=Cj0KCQiAiNnuBRD3ARIsAM8KmluPfvNYnN69CZKeA8cBNe9cFZV6PfrqEL1sD19LW94GpYykGbYqMkEaAt_iEALw_wcB

²⁰ Ibid.

²¹ Zia Mian, Abdul Nayyar, Sandeep Pandey, M. V. Ramana. Bulletin of The Atomic Scientists. "India, Pakistan, Kashmir: Taking The War Option off The Table". 23 September 2019. Diakses pada 1 Desember 2019. <https://thebulletin.org/2019/09/india-pakistan-kashmir-taking-the-war-option-off-the-table/#>

²² Ibid.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah pada aspek apa yang menjadi dasar klaim Pakistan atas wilayah Jammu dan Kashmir yang saat ini berada di bawah kekuasaan India. Maka, tulisan ini tidak akan terlalu banyak membahas konflik Kashmir secara kronologis antar kedua negara yang berperang, tetapi penulis mengambil sudut pandang yang lebih spesifik serta menjadi salah satu akar konfliknya yaitu klaim salah satu pihak yaitu Pakistan atas wilayah Jammu dan Kashmir ini. Kemudian dasar klaim Pakistan yang dibahas juga terbatas pada aspek identitas sosial yaitu agama. Agama yang dimaksud pada tulisan ini bukan agama sebagai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan agama sebagai unsur pembentuk dari identitas sosial negara Pakistan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan aspek - aspek terkait dalam penelitian pada bagian latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang penulis buat adalah:

“Apa yang menjadi dasar klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh gambaran bahwa apa yang menjadi dasar dari klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir.

2. Menggambarkan bagaimana aspek identitas sosial dapat menjadi dasar yang kuat bagi Pakistan mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa tulisan ini memiliki kegunaan untuk:

1. Menjadi tambahan referensi untuk studi kawasan Asia Selatan, khususnya pada lingkungan akademik Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang saat ini belum terdapat mata kuliah Hubungan Internasional Kawasan di Asia Selatan.
2. Menjadi sumber lanjutan mengenai kajian konflik dan perdamaian untuk studi kasus konflik antar hegemon dalam suatu regional.

1.4 Kajian Literatur

Penulis dalam melakukan penelitian ini melakukan kajian literatur untuk mencari buku maupun jurnal yang mengkaji aspek yang sama atau mendekati dengan aspek penelitian ini. Penulis akan melihat apa yang sudah banyak di tulis oleh beberapa peneliti serta ruang kosong dari aspek apa yang belum dilakukan penelitiannya. Literatur pertama berjudul “Kashmir Issue and Pakistan Foreign Policy”, karya Nawabzada Nasrullah Khan. Pada jurnal ini meskipun mengangkat judul “...Pakistan Foreign Policy”, namun pembahasannya lebih menjelaskan secara kronologis saja, bukanlah analisis mengenai politik luar negeri Pakistan di Kashmir. Memang sempat dijelaskan bagaimana upaya politik luar negeri yang dilakukan Pakistan untuk membantu menyelesaikan konflik Kashmir, seperti

menerima kedatangan Presiden Bill Clinton, mengundang pemimpin India hingga mengajak bicara seluruh pemimpin sub-provinsi Kashmir dalam satu meja.²³ namun apa yang dijelaskan disini lebih seperti menceritakan sejarah Pakistan pada konflik Kashmir, tidaklah menganalisis apa yang terjadi pada saat itu. Analisis motif maupun *decision making process* dalam kebijakan luar negeri ini tidaklah dibahas mendalam, melainkan hanya mendeskripsikan saja.

Literatur kedua yaitu berjudul “KASHMIR: A Conflict Between India and Pakistan”, karya Abdul Majid dan Mahboob Hussain. Pada Literatur ini dibahas mengenai usaha resolusi konflik dari kedua negara dengan melibatkan aktor eksternal kawasan yaitu PBB dengan resolusinya yang kemudian dikaitkan dengan pelanggaran kemanusiaan di Kashmir. Namun pada bagian awal *paper* ini, terlihat *stance* penulis seperti memihak pada India, karena menganggap Pakistan dan masyarakat Kashmir sendiri sebagai penghambat proses reintegrasi Kashmir ke wilayah di bawah kekuasaan India. Secara keseluruhan jurnal ini dengan tersirat membahas bahwa Pakistan merupakan salah satu aktor yang menyebabkan mengapa konflik Kashmir antara India dan Pakistan itu tidak kunjung usai, meski telah dilakukan beragam upaya seperti melalui Resolusi PBB, melalui jalur diplomasi hingga melibatkan badan Amnesty Internasional.²⁴

Literatur yang ketiga berjudul “Kashmir Dispute Between Pakistan and India: The Way Out”, karya Sadia Fayaz. Dibandingkan dengan dua jurnal sebelumnya, jurnal yang ini mengkaji kedua negara sebagai aktor konflik Kashmir secara lebih

²³ Nawabzada Nasrullah Khan. “Kashmir Issue and Pakistan Foreign Policy”. Pakistan Institute of International Affairs. Pakistan Horizon. Volume 54, No. 1. 2001. Diakses pada 2 Desember 2019.

²⁴ Abdul Majid, Mahboob Hussain. “KASHMIR: A Conflict Between India and Pakistan”. South Asian Studies, University of Punjab, Lahore. A Research Journal of South Asian Studies. Volume 31 No. 1. Januari – Juni 2016. Halaman 149 – 159. Diakses pada 2 Desember 2019.

netral. Diulas bahwa kedua negara telah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini namun dengan runtutan waktu yang berbeda beda sehingga sulit menemui titik temunya, namun kembali kedua negara ini juga dalam aspek lainnya membuat konflik ini sukar diselesaikan karena masing masing negara masih menempatkan pasukannya pada *line of control* atau garis batas kekuasaannya masing – masing.²⁵ Selain itu faktor yang juga menjadi penyebab konflik ini adalah banyak kelompok sub-agama yang radikal di wilayah Kashmir sendiri.²⁶ Kelompok – kelompok radikal ini tidaklah memihak pada India maupun Pakistan tetapi merupakan kelompok yang ingin memerdekakan sendiri sehingga proses resolusi dua negara, antara India dan Pakistan tidak juga menyelesaikan masalah sebab ada aktor lain yang juga memiliki kepentingan yang kemudian memperburuk permasalahan.

Ketiga literatur yang telah penulis ulas tersebut memiliki kesamaan pada aspek keterlibatan Pakistan dan India pada konflik Kashmir yang intensif, sejak awal konflik terkskalasi, politik luar negeri terhadap isu Kashmir, landasan awal mengapa kedua negara harus terlibat dalam konflik ini, hingga keterlibatan aktor lain yang menyebabkan konflik ini tidak pernah menemui jalan keluar meskipun baik India maupun Pakistan sudah beberapa kali duduk satu meja untuk menyelesaikan permasalahan di Kashmir ini. Namun, dari setidaknya dari ketiga literatur di atas belum ada yang membahas mengenai faktor dasar apa yang membuat kedua negara harus terlibat dalam permasalahan ini. Maka dari itu, berangkat dari aspek yang belum dibahas dalam ketiga literatur tersebut, penulis mengangkat topik tentang dasar klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan

²⁵ Sadia Fayaz. “Kashmir Dispute Between Pakistan and India. The Way Out”. Department of Political Science, Qurtuba University of Science and Information Technology Peshawar. Januari – Maret 2016. Halaman 65 – 82. Diakses pada 3 Desember 2019.

²⁶ Ibid.

Kashmir melalui perspektif identitas sosial sebagai topik penelitian. Sebab dasar klaim dari salah satu aktor yang terlibat yakni Pakistan merupakan hal yang penting dan fundamental yang menyebabkan mengapa Pakistan menjadi harus terlibat dalam konflik Kashmir karena klaim negara tersebut terhadap wilayah Jammu dan Kashmir.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran dari *Religious social identity* yang merupakan konsep turunan dari *social identity theory*. Konsep ini menjelaskan bagaimana agama sebagai salah satu unsur yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bagian konstruktif dalam pembentukan suatu identitas sosial. Sebagaimana konsep turunan dari teori *social identity*, asumsi yang digunakan ialah “sense of self from identification with a social group”.²⁷ Asumsi ini diartikan bahwa adanya cerminan identitas diri di dalam suatu kelompok sosial. Cerminan identitas diri yang penulis maksud adalah masyarakat Pakistan, sedangkan kelompok sosial adalah negara Pakistan. Negara Pakistan dikategorikan sebagai kelompok sosial karena Pakistan merupakan negara multietnis yang terbentuk dari berbagai kelompok suku dan budaya yang berbeda. Diantaranya ada suku Balochis, Sindh, Pakhtun atau Pashtun, Kashmiri serta Punjabi.²⁸

²⁷ Henri Tajfel (1981), dalam Pazit Ben-Nun Bloom et al. “Religious Social Identity, Religious Belief and Anti-Immigration Sentiment”. Pada *American Political Science Review*. Volume 109, No. 2. Mei 2015. Halaman 204 – 205. Diakses pada 6 Juli 2020.

²⁸ Hassan Abbas. “Profile of Pakistan’s Seven Tribal Agencies”. *The Jamestown Foundation*. Terrorisme Monitor Volume: 4. Issue: 20. 20 Oktober 2006. Diakses pada 10 Juli 2020. <https://jamestown.org/program/profiles-of-pakistans-seven-tribal-agencies/>

Pada bab 3 nanti akan dijelaskan bagaimana identitas negara Pakistan menjadi dasar klaim pemerintahnya atas wilayah Jammu dan Kashmir. Berikutnya asumsi yang digunakan adalah bahwa setiap kelompok sosial memiliki identitasnya sendiri, “a group can be said to have an identity of its own”.²⁹ Dengan konsep ini akan menjelaskan bahwa suatu kelompok akan disebut sebagai kelompok ketika memiliki suatu identitas. Pada tulisan ini, konsep ini akan menjelaskan bahwa agama menjadi suatu identitas dari apa yang disebut kelompok, yaitu Negara Pakistan. Kemudian untuk menganalisis ‘signifikansi’ agama dalam suatu identitas, penulis menggunakan asumsi yang ditawarkan oleh Jeffrey Seul dalam jurnal yang sama, Seul menyebutkan bahwa agama memiliki kapabilitas dalam membentuk identitas, “powerful ability of religion to serve the identity-related needs”.³⁰

Pada aspek identitas sosial yang menjadi alat analisis pada tulisan ini, penulis menggunakan agama sebagai faktor di dalam identitas sosial sebagai pisau analisis. Penulis juga menggunakan pengertian agama yang ditawarkan oleh Jeffrey Seul pada jurnal yang sama, yaitu agama adalah sistem relasi yang seluas mungkin, antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain di sekitarnya, dengan manusia lain, dengan makhluk hidup, dengan alam semesta serta dengan Tuhannya yang dipercayai bahwa itu nyata dan benar.³¹

Pada konsep *religious social identity* ini terdapat juga kerangka pemikiran bahwa suatu identitas kelompok memiliki konsepsi atas nilai dasar yang kuat, hal

²⁹ Jeffrey R. Seul. “ ‘Ours Is The Way Of God’: Religion, Identity and Intergroup Conflict”. *Journal of Peace Research*. Harvard Law School. Sage Publications. London. Halaman 555. 1 September 1999. Diakses pada 11 Juli 2020.

³⁰ Ibid. Halaman 563.

³¹ Ibid. Halaman 558.

ini dibangun oleh pengalaman sejarah masa lalu, tujuan atau situasi saat ini.³² Pengalaman sejarah antara Bangsa Pakistan dengan Kashmir ini akan memberi justifikasi pada persamaan identitas mereka. Kelman menjelaskan pada jurnal yang telah penulis kutip sebelumnya bahwa identitas kelompok yang dimiliki akan juga dipersepsikan sebagai identitas personal dari pihak yang menjadi anggota kelompok tersebut, hal ini akan diperkuat dengan adanya ‘produk’ sejarah yang dimiliki seperti dokumen tertulis, maupun tradisi lisan.³³ Selain pengalaman sejarah, tulisan ini pada bagian analisis akan membahas bagaimana agama dapat membangun narasi yang kuat. Agama yang merupakan bagian dari identitas sosial suatu kelompok dapat memberikan narasi yang kuat bagi kelompok tersebut yang mana terbangun sejak fase awal terbentuknya kelompok tersebut.³⁴ Narasi yang dibangun oleh kelompok sosial yang dimaksud ini memiliki pengaruh besar dari agama mayoritas yang menjadi satu identitas bersama. Masih pada jurnal yang sama diberikan asumsi yang mendukung premis sebelumnya terkait agama mayoritas. Agama mayoritas akan memberikan sumber identifikasi yang kuat untuk dapat memberikan penggolongan bahwa kelompok mana yang menjadi bagian dari mereka dan mana yang bagian dari eksternal mereka.³⁵ Kelompok yang teridentifikasi menjadi bagian dari mereka akan cenderung mendapat pengakuan sedangkan yang tidak akan cenderung disingkirkan. Asumsi ini yang akan

³² Herbert Kelman. “The Place of Ethnic Identity In The Development of Personal Identity: A Challenge for A Jewish Family”. *The Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry*. The Hebrew University of Jerusalem. Editor: Peter Y. Medding. *Coping With Life And Death. Jewish Families In Twentieth Century. Studies In Contemporary Jewry, An Annual XIV*. 1998. New York. Oxford University Press. Halaman 16. Diakses pada 12 Juli 2020.

³³ Ibid. Halaman 17.

³⁴ Op. Cit. Pazit Ben-Nun Bloom. Halaman 204.

³⁵ Op. Cit. Pazit Ben-Nun Bloom. Halaman 205.

menjelaskan apa dasar klaim Pakistan dalam mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data

1.6.1. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan teknik interpretatif dari suatu data atau fenomena, dengan kata lain, penelitian kualitatif ini akan mengungkap suatu makna dari data yang didapatkan. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis sebagai peneliti merupakan aktor kunci.³⁶ Maksud aktor kunci disini adalah peneliti sangat berperan dalam pengumpulan data, pengambilan dan pencairan data, melalui sumber sekunder, seperti dokumen, arsip buku hingga jurnal.³⁷ Dengan peneliti sebagai aktor kunci ini, juga memiliki makna bahwa penyajian hasil penelitian nantinya akan sangat terkait dengan nilai serta persepsi yang dimiliki oleh peneliti tersebut, sebab pada dasarnya penelitian kualitatif ini melibatkan nilai sosial dalam suatu penelitiannya. Kemudian metode penelitian kualitatif juga menggunakan triangulasi data sebagai bahan analisis.³⁸ Triangulasi adalah mencari sumber data yang berbeda untuk mencari data yang relatif sejenis untuk menghilangkan bias data, sehingga dalam penelitian kualitatif ini

³⁶ John Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches". Third Edition. Sage Publications. Thousands Oaks, California. 2009. ISBN: 978-1-14129-6556-9. Halaman 175 - 177. Diakses pada 28 Maret 2019.

³⁷ Ibid.

³⁸ Lawrence Neumann. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches". Seventh Edition. Pearson New International Edition. Essex, England. 2014. ISBN: 978-1-292-02023-5. Halaman 477 – 480. Diakses pada 28 Maret 2019.

membutuhkan data yang lebih banyak dan lebih beragam.³⁹ Sehingga pada penelitian ini, penulis akan mencari lebih banyak data untuk mengungkap makna atas fenomena yang terjadi di lapangan seperti apa.

Setelah melakukan triangulasi data, data tersebut akan dijadikan satu bahan analisis yang akan penulis paparkan pada bab tiga dalam tulisan ini. Sebab dalam metode penelitian dibutuhkan suatu kerangka pemikiran untuk menganalisis fenomena yang diteliti sehingga teruji secara akademis serta terhindar dari bentuk penulisan yang terkesan hanya memaparkan cerita mengenai fakta sejarah atau fenomena hubungan internasional saja. Kerangka pemikiran di dalam penelitian kualitatif memiliki fungsi untuk membentuk suatu perspektif terhadap penelitian agar analisisnya relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dibuat.⁴⁰ Kerangka pemikiran ini juga dapat membatasi dan memfokuskan pada satu bagian penting yang menjadi objek utama dalam penelitian, tidak menjadi melebar ke objek yang tidak perlu.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yang telah penulis sebutkan yaitu metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara studi pustaka atau studi literatur. Studi pustaka yang dilakukan penulis bersumber pada buku, jurnal, *web*, berita, majalah, laporan hingga dokumen penting negara

³⁹ Ibid.

⁴⁰ John Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches". Fourth Edition. Sage Publications. Thousands Oaks, California. 2014. ISBN: 978-1-4522-2609-5. Halaman 130 – 134. Diakses pada 5 Juli 2020.

yang dapat penulis akses. Dengan data yang penulis kumpulkan ini, kemudian akan penulis analisis untuk kemudian diinterpretasi sesuai persepsi penulis.⁴¹ Dari sumber pustaka yang telah disebutkan, penulis akan menggunakan data historis Pakistan atas klaimnya terhadap wilayah Jammu dan Kashmir, data ini termasuk narasi yang dibangun oleh pemerintah Pakistan dalam melakukan klaimnya itu. Kemudian penulis akan melakukan generalisasi data atas temuan riset yang telah dilakukan, untuk selanjutnya dilakukan analisis pada hasil generalisasi tersebut. Ini dilakukan sebab analisis kerja pada generalisasi data hasil riset adalah struktur utama dari sebuah penelitian kualitatif, termasuk juga penelitian yang melibatkan sebuah studi kasus.⁴² Selain itu, penulis juga akan mencari data dari laporan, publikasi maupun *working paper* dari lembaga *think tank* atau lembaga penelitian di dunia, untuk memperoleh data yang valid serta juga memperoleh data dan pemaparan fenomena yang lebih objektif.⁴³ Sehingga generalisasi yang dilakukan penulis dapat lebih merepresentasikan fenomena di lapangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi:

⁴¹ Wendy Hollway dan Tony Jefferson. "Doing Qualitative Research Differently: Free Association, Narrative and The Interview Methods". Sage Publications. 6 Bonhill Street, London 2000. Halaman 55 – 58. Diakses pada 28 Maret 2019.

⁴² Anssi Perakyla. Pada bab "Reliability and Validity In Research Based On Naturally Occurring Social Interaction". Pada buku "Qualitative Research, Theory Method and Practice". Edisi Kedua. New Delhi. Sage Publications. Editor: David Silverman. Halaman 299 – 300. Diakses pada 15 Juli 2020.

⁴³ Lihat James Joseph Scheurich. "Research Method In The Postmodern". *Qualitative Study Series:3*. London. The Falmer Press (A Member of Taylor & Francis Group).. 1997. ISBN: 0750706457. Halaman 80 – 86. Diakses pada 22 Juli 2020.

Bab I: Pendahuluan

Bab I ini berisi pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah dan identifikasi masalah pada bagian awal pembahasan. Latar belakang masalah akan membahas bahwa Pakistan dan India sudah memiliki wilayah kekuasaannya masing – masing pada wilayah Kashmir. Pakistan memiliki *Pakistan administered Kashmir* yaitu wilayah Azad Jammu dan Kashmir dan Gilgit-Baltistan, sedangkan India memiliki *Indian administered Kashmir* yaitu wilayah Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Wilayah antara *Pakistan administered Kashmir* dan *Indian administered Kashmir* ini dibatasi oleh garis khayal yang disepakati oleh kedua negara yang disebut dengan *line of control* (LoC). Lalu pada bagian Identifikasi Masalah akan membahas bagaimana Pakistan berusaha mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir yang sebenarnya telah dikuasai oleh Pemerintah India. Pakistan mengklaim atas dasar persamaan identitas yaitu agama islam. Kemudian terdapat juga pertanyaan penelitian yang mempertanyakan apa dasar klaim Pakistan untuk mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir yang notabene sudah berada di bawah kekuasaan India. Lalu pada bab I ini juga terdapat kerangka pemikiran sebagai kerangka analisis terhadap kasus yang diangkat. Kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah *Religious Social Identity* yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Jeffrey Seal, Pazit Ben-Nun Bloom, Herbert Kelman, Renate Ysseldik, Kimberly Mathson, Marie Courtemanche dan beberapa ahli lain yang mengungkapkan pandangannya soal konsep ini. Rata – rata mereka ini adalah ahli pada bidang ilmu perbandingan agama, antropologi agama, psikologi sosial, studi konflik, ilmu politik dan hukum. Selain itu pada bab I ini membahas juga tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, pembatasan masalah, metode penelitian hingga sistematika pembahasan.

Bab II: Status Quo atau keadaan tetap dari Jammu dan Kashmir

Pada bab II ini akan dibahas bagaimana keadaan tetap atau keadaan sebenarnya dari Jammu dan Kashmir. Bagaimana sejarah Kashmir, seperti apa pembentukan dua negara antara Pakistan dan India yang akhirnya berusaha memiliki kekuasaan di Kashmir hingga menjelaskan kondisi geografis, ekonomi dan sosial budaya dari Jammu dan Kashmir. Lalu akan dibahas juga terkait pembentukan *line of control* sebagai batas wilayah kekuasaan antara *Pakistan administered Kashmir* dan *Indian administered Kashmir*. Selain membahas *line of control* membahas juga perjanjian *simla agreement* yaitu perjanjian yang menelurkan *line of control* tersebut. Lalu pada bab II juga akan menjelaskan posisi Jammu dan Kashmir di bawah sistem administrasi India. Artinya sub bab ini akan membahas mengenai kedudukan Jammu dan Kashmir di India termasuk perubahan status yang awalnya adalah negara bagian (*state*) menjadi *union territories* oleh Pemerintah India. Lalu pada sub bab selanjutnya menjelaskan status istimewa atau hak istimewa yang dimiliki oleh Jammu dan Kashmir sebagai negara bagian di India hingga tahun 2019, sebelum ditarik hak istimewanya oleh Narendra Modi. Status istimewa ini hanya dimiliki Jammu dan Kashmir saja, tidak dimiliki oleh negara bagian lain. Setelah itu, pada sub bab selanjutnya akan membahas klaim Pakistan yang terhadap wilayah Jammu dan Kashmir. Jadi pada sub bab ini sedikit banyak akan menjelaskan apa saja usaha atau langkah Pakistan dalam mengklaim Jammu dan Kashmir.

Bab III: Dasar Klaim Pakistan Terhadap Wilayah Jammu dan Kashmir

Pada bab III ini akan menjelaskan topik pembahasan utama yaitu dasar klaim Pakistan terhadap wilayah Jammu dan Kashmir menggunakan kerangka pemikiran dari konsep *Religious Social Identity* yang sudah penulis jelaskan pada bab I. Analisis pada bab ini akan banyak membicarakan bagaimana peran agama islam sebagai pembentuk identitas di Pakistan terhadap klaim Pakistan atas wilayah Jammu dan Kashmir. Faktor apa saja dalam islam yang memiliki pengaruh terhadap identitas di Pakistan akan dijelaskan pada bagian ini, juga analisis lain yang kemudian menjustifikasi mengapa Pakistan melakukan klaim terhadap Jammu dan Kashmir.

Bab IV: Kesimpulan

Bab IV adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Isi dari bab IV akan mengulangi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibahas pada bab III secara runut, singkat, dan jelas. Terakhir bab ini akan menampilkan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada skripsi yang penulis buat.

